
Pemberdayaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) melalui *interbank network* sebagai solusi optimasi perekonomian nasional

Nur Ghaziyatul Iffah¹, Dian Fatma Hadi²

^{1,2} STIE Perbanas Surabaya, Jalan Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to see the existence and development of BMT in Indonesia, BMT's potential in existing interbank network and to see the steps to optimize the BMT. The method used is descriptive qualitative with secondary data approaches by collecting relevant information based on the topic or problems that are being studied through media such as news, internet sites, journals that discuss about the problem's issues related with BMT's role and giving synthesis based on those information. BMT's development through the increasing expansion of network between BMT and Syariah Micro-Financial Entity which is a solution to create a powerful BMT, independent and professional. With the existence of interbank network that based on syariah, hopefully this can be the solution to empower Syariah Micro-Financial Entity to increase sustainably the services quality as form of trust, effort and government's concern towards Syariah Micro-Financial Entity in the development of national economy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dan perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia, potensi BMT dalam mewujudkan interbank network dan mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dioptimalisasi BMT. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan data sekunder dengan menghimpun informasi yang relevan berdasarkan topik atau masalah yang sedang diteliti melalui berbagai media seperti berita, situs-situs internet, jurnal-jurnal yang membahas tentang isu-isu permasalahan yang terkait dengan peran BMT dan memberikan sintesis berdasarkan informasi tersebut. Pengembangan BMT melalui peningkatan jaringan yang lebih meluas (*interbank network*) antar BMT dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM-S) lainnya merupakan solusi dalam mewujudkan BMT yang kuat, mandiri dan profesional. Dengan adanya solusi pembentukan interbank network yang berbasis syariah ini diharapkan dapat menjadi solusi pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM-S) dalam meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkelanjutan sebagai bentuk kepercayaan, usaha dan kepedulian Pemerintah terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM-S) dalam pembangunan ekonomi nasional.

Keywords:

Baitul Maal wat Tamwil, Interbank Network, and National Economy.

1. PENDAHULUAN

Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada Abad ke-7 Masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran Romawi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kehidupan sosial lainnya termasuk ekonomi berkembang secara cepat. Fakta sejarah itu

JBB
7, 1

125

Received 6 February 2017
Revised 20 April 2017
Accepted 28 May 2017

JEL Classification:
G21

DOI:
10.14414/jbb.v7i1.1466

**Journal of
Business and Banking**

ISSN 2088-7841

Volume 7 Number 1
May – October 2017

pp. 125–138

© STIE Perbanas Press
2017

sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif.

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi Rules of The Game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Sebagaimana firman-Nya: "...dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan sesuatu..." (QS. An-Nahl: 89). Allah SWT juga berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut: "Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi Agama bagimu."

Dari firman Allah SWT tersebut secara jelas menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan memiliki sistem tersendiri yang mengatur mengenai segala permasalahan kehidupan, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah. Mengenai bidang ibadah yakni tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Mengenai muamalah dalam pengertian yang luas yakni ketetapan yang diberikan oleh Allah SWT yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada pokok-pokok saja, karena sifatnya yang pada dasarnya semua perbuatan muamalah "boleh" dilakukan, kecuali untuk perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Salah satu hal yang boleh dilakukan dibidang muamalah adalah kegiatan ekonomi.

Banyaknya lembaga keuangan makro maupun mikro yang tersebar ke berbagai pelosok tanah air, rupanya belum mencapai kondisi yang ideal jika diamati secara teliti. Hal ini nampak dari banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar target pendapatan masing-masing, sehingga tujuan yang lebih besar sering terabaikan, khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Padahal, lembaga keuangan mikro mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Jika berharap kepada peran lembaga keuangan makro, jelas hal ini sulit diharapkan. Kredit yang diberikan berbagai lembaga keuangan sampai saat ini masih didominasi kredit konsumtif, sehingga laju ekonomi masyarakat cenderung konsumtif, kurang produktif.

Dalam kondisi yang demikian inilah baitul maal wat tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumiyanto (2008: 16) yang mengatakan "BMT sendiri merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang paling sederhana". Realitas di lapangan, dalam beberapa tahun terakhir BMT mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan BMT yang pesat ini terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa intermediasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. keuangan, namun disisi lain akses ke dunia perbankan yang lebih formal relatif sulit dilakukan.

Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Maal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Maal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.

Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah.

Istilah BMT mengemuka sejak tahun 1992, pada awalnya BMT hanya sekedar menghimpun dan menyalurkan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dari para pegawai dan karyawan suatu instansi untuk dibagikan kepada mustahiqnya, lalu berkembang menjadi sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak dibidang simpan pinjam dan usaha-usaha pada sector riil. BMT membuka kerja sama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi Islam yakni transparansi, saling rela, percaya, dan tanggung-jawab, serta terutama system bagi hasilnya. Sebagai sebuah konsep BMT itu terus berproses dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu ke waktu. Karena prinsip suka rela yang tidak memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya.

Pertumbuhan BMT di Indonesia semakin menunjukkan tren kemajuan yang signifikan. Dengan sasaran utama para pelaku usaha mikro dan super mikro yang umumnya berada di pedesaan, BMT menjelma menjadi penggerak ekonomi rakyat kecil yang tangguh. Sampai saat ini, sudah terdapat sekitar tiga juta nasabah mikro yang memperoleh dari pembiayaan dari BMT. Aset yang dikelola BMT mencapai angka Rp 3 Triliun. Saat ini sudah ada sekitar ±4000 BMT yang tersebar diseluruh Indonesia.

Pada awal berdirinya BMT, tahun 2005 asetnya mencapai sekitar Rp 364 miliar, tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi Rp 458 miliar, tahun berikutnya menjadi Rp 695 miliar, pada tahun 2008 dan 2009 aset para anggota berkembang mencapai Rp 1 triliun dan Rp 1,6 Triliun. Data terakhir, pada tahun 2010 mencapai 50 persen dari seluruh total aset seluruh BMT yang ada di Indonesia. Terus meningkatnya BMT membuktikan lembaga tersebut mampu menunjukkan diri sebagai lembaga yang andal terkait menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bahkan terbilang luar biasa karena mayoritas anggota nasabahnya adalah pelaku usaha berskala mikro yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai sumber dana.

Pembiayaan LKM-S di sektor pertanian sampai dengan akhir tahun 2010, penyaluran kredit di sektor pertanian sebesar Rp 91 triliun atau 5,15% dari total kredit Perbankan. Dari kredit tersebut, sebesar Rp 1,76 triliun atau 1,9% merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah dan lembaga keuangan non-bank Syariah termasuk Baitul Maal Wat Tanwil (BMT). BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil.

Di samping itu di tengah kehidupan masyarakat yang hidup modern serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah.

Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Maka dengan melihat pemaparan yang singkat diatas, penulis merasa tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah, dengan memberikan gagasan secara tertulis tentang hal-hal apa saja yang perlu dioptimalisasikan oleh Pemerintah terhadap peran BMT yang ada di Indonesia sebagai bentuk pengembangan ekonomi mikro dalam mewujudkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM-S) yang kuat, mandiri dan profesional sehingga dapat bersaing secara kompeten dan sebagai wujud pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku nasabah BMT maupun LKM-S lainnya di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis sehingga dapat mengetahui (2) bagaimana eksistensi dan perkembangan BMT di Indonesia, (2) potensi BMT dalam mewujudkan *interbank network*, (3) langkah-langkah optimalisasi pemberdayaan BMT di Indonesia.

2. RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut UU No.1 tahun 2013 pasal 1, Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM-S) merupakan LKM yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Dalam definisi LKM ada banyak unsur. Namun, tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut, diutamakan sebagai berikut:

1. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan
2. Menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi.
3. Melayani rakyat miskin
4. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas.
5. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel

Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang di-

layani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Mikro Syariah), BMT (Baitul Maal Wat Tanmil), serta Koperasi Syariah. Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar.

JBB

71

129

Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam.

BMT berfungsi sebagai:

1. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

Ciri -ciri dari BMT adalah sebagai berikut:

1. Berbadan Hukum Koperasi.
2. Bertujuan menyediakan dana murah dan cepat serta tidak berbelit-belit guna pengembangan dan memajukan usaha bagi anggotanya.
3. Skala produk dan pendanaan yang terbatas menjadi Prinsip dan pembeda dengan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan mekanismenya dan transaksinya hampir sama dengan perbankan syariah.

Pengertian *Interbank network* dan *Interbank Fund Transfer*

Sejak 1960, saat Westminster Bank menginstal pertama kali automated teller machine (ATM) di Victoria, sistem pembayaran yang menggunakan jaringan elektronik mulai sering digunakan pada sektor perbankan dan dunia bisnis, khususnya untuk kegiatan transfer uang dalam jumlah besar. Menurut Federal Financial Institutions Examination Council (2010), pembayaran elektronik adalah praktek pembayaran baru untuk ritel di mana seorang pedagang mengambil informasi pembayaran untuk barang dan jasa dan menempatkan informasi ini dalam sebuah electronic template yang menciptakan file elektronik untuk diproses melalui

jaringan kliring.

Interbank network pada dasarnya adalah sebuah jaringan antar lembaga bank, atau juga dikenal sebagai konsorsium ATM atau jaringan ATM, adalah jaringan komputer yang memungkinkan kartu ATM yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan, yang merupakan anggota dari lembaga yang mengeluarkan instrumen, yang akan digunakan untuk melakukan transaksi ATM melalui ATM milik anggota lainnya. Namun, fungsi yang dapat dilakukan pada jaringan ATM bervariasi. Misalnya, layanan khusus, seperti pembelian pulsa ponsel, mungkin tersedia untuk memiliki bank tetapi tidak untuk jaringan pemegang kartu ATM. Selanjutnya, pemilik ATM dapat dikenakan biaya untuk penggunaan kartu jaringan (selain biaya yang dikenakan oleh bank penerbit). Jaringan antar bank memungkinkan kartu ATM untuk memiliki akses ke ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM ketika bank mereka sendiri tidak tersedia. Hal ini terutama nyaman bagi wisatawan bepergian ketika tidak menemukan ATM cabang lembaga keuangan yang mengeluarkan instrumen tersebut di mana kartu ATM diperlakukan sebagai kartu debit.

ATM Bersama adalah aplikasi *interbank network* (jaringan ATM) berbasis *Interbank Fund Transfer* pertama yang beroperasi di Indonesia, yang awalnya menghubungkan 20 (dua puluh) satu bank di Indonesia. Jaringan ini didirikan oleh PT Artajasa Pembayaran Elektronik pada tahun 1990 dengan mengadopsi model dari MegaLink, yaitu sebuah jaringan ATM di Filipina. Saat ini jaringan ATM Bersama memiliki lebih dari 80 anggota yang terdiri dari bank dan lembaga selain bank. ATM Bersama menyediakan banyak fasilitas termasuk cek saldo, penarikan tunai dan pemindahan dana secara online seketika ke rekening lain dari sesama anggota jaringan ATM Bersama.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penulisan

Jenis penulisan karya tulis ilmiah ini merupakan jenis karya tulis deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data dan angka, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik. Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menjabarkan tentang hal-hal apa saja yang perlu dioptimalisasikan oleh Pemerintah terhadap peran BMT sebagai wujud pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM-S) dalam menjalankan fungsi *interbank network*.

Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini tidak menyimpang dari judul diatas, maka ruang lingkup pembahasan terbatas hanya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKM-S) khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Teknik dan Prosedur Penulisan

Metode pengumpulan data dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini

dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu, suatu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan berdasarkan topik atau masalah yang sedang diteliti. Penulis melakukan pencarian informasi yang relevan melalui berbagai media seperti berita maupun situs-situs internet, jurnal-jurnal yang membahas tentang isu-isu permasalahan yang terkait dengan peran BMT dan memberikan sintesis berdasarkan informasi tersebut.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Eksistensi dan Perkembangan BMT Di Indonesia

Istilah Baitul Mal sesungguhnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, meski saat itu belum terbentuk lembaga yang mandiri dan terpisah. Baitul Maal baru berdiri sebagai lembaga ekonomi tersendiri pada masa Khalifah 'Umar bin Khatab atas usulan seorang ahli fiqih yang bernama Walid bin Hisyam. Sejak masa itu dan masa-masa selanjutnya (Dinasti 'Abbasiyah dan Umawiyah), Baitul Mal telah menjadi lembaga yang penting bagi negara. Meski tidak semua sumber uang negara milik Baitul Mal, tetapi Baitul Mal boleh dikatakan merambah banyak urusan, mulai dari penarikan zakat, pajak, ghanimah sampai membangun jalan-jalan, menggaji tentara dan para pejabat negara serta membangun sarana-sarana sosial lainnya.

Dari rentetan sejarah, Baitul Mal harus diakui telah tampil dalam panggung sejarah Islam sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan penciptaan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Keberadaannya telah menghiasi lembaran sejarah Islam dan terus berlangsung hingga runtuhnya Khilafah yang terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924.

Adapun di Indonesia, Baitul Tamwil pernah merebak melalui Baitul Tamwil Teknosa Salman maupun Baitul Tamwil Ridha Gusti, yang kini tinggal sejarah. Kedua lembaga tersebut sesungguhnya merupakan cikal bakal lahirnya Bank Islam, yang kini diperkenalkan oleh Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Dalam perkembangan terakhir pada tahun 2010, telah ada sekitar 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Jika ditambah dengan perhitungan mobilitas yang tinggi dari para pengelola BMT untuk "jemput bola", memberikan layanan di luar kantor, maka sosialisasi keberadaan BMT telah bersifat masif. Wilayah operasionalnya pun sudah mencakup daerah pedesaan dan daerah perkotaan, di pulau Jawa dan luar Jawa.

BMT-BMT tersebut diperkirakan melayani sekitar 3,5 juta orang nasabah, yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro dan usaha kecil. Cakupan bidang usaha dan profesi dari mereka yang dilayani sangat luas. Mulai dari pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan, penjahit rumahan, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak, sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relatif modern.

Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya BMT, maka para penggiat BMT mulai sadar akan perlunya suatu kebersamaan yang lebih kuat lagi, sehingga lahirlah berbagai asosiasi. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain: Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa

Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera dan Aceh. Awalnya adalah asosiasi BMT daerah, seperti asosiasi BMT Surakarta, Asosiasi BMT Klaten, Asosiasi BMT Wonosobo, dan lain-lain. Terdapat sekitar ±142 BMT yang menjadi anggotanya sampai dengan pertengahan 2010. Bisa dikatakan, hampir semua yang termasuk besar menurut ukuran BMT bergabung dalam BMT Center. Namun, syarat dan kriteria yang utama dalam penerimaan keanggotaan BMT center adalah kesehatan operasional dan kelembagaannya, serta komitmen untuk mengembangkan gerakan BMT secara nasional.

Pada tanggal 14 Juni 2005, Perhimpunan BMT Indonesia, yang sempat dikenal dengan sebutan BMT Center, didirikan di Jakarta oleh 96 BMT, yang merupakan asosiasi atau perhimpunan BMT berskala Nasional yang pertama. Kemudian pada bulan Juli 2005, di Auditorium BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Lasem berdirilah asosiasi BMT Jawa Tengah. Pada bulan Desember 2005, melalui Kongres BMT Nasional yang dihadiri oleh BMT-BMT utama diseluruh Indonesia, berdirilah asosiasi Baitul Maal Wat Tamwil Se-Indonesia (ABSINDO).

Sampai dengan Desember 2005, ketika BMT center masih beranggotakan 96 BMT, total aset para anggota adalah sekitar Rp 364 milyar. Dengan adanya pertumbuhan selama tahun berjalan dan penambahan beberapa anggota baru, maka sampai dengan akhir tahun 2006, aset total adalah sekitar Rp 458 miliar. Nilai ini terus meningkat menjadi Rp 695 miliar pada akhir tahun 2007, hampir mencapai Rp 1 trilyun pada akhir tahun 2008, dan sekitar Rp 1,6 trilyun pada akhir 2009. Nilai tersebut diperkirakan sekitar 50 persen dari total BMT yang mencapai lebih dari Rp 3 trilyun.

Ekonomi berbasis syariah diperkirakan masih akan terus berkembang seiring kecenderungan masyarakat, khususnya warga muslim, yang menginginkan model ekonomi syar'i dalam bertransaksi. Institusi keuangan non formal seperti rentenir dan berbagai macam individu yang meminjamkan uang dengan tingkat bunga yang tinggi diberikan kesempatan untuk tumbuh subur, namun BMT pada kenyataannya tetap memberikan pelayanan pinjaman kepada nasabah yang penghasilannya dua dolar per hari sekalipun untuk keperluan produktif. Dengan kehadiran BMT secara perlahan akan mengurangi jumlah rentenir yang beroperasi menyerap sumber keuangan ekonomi kerakyatan.

Pada dasarnya BMT adalah pelaku usaha super mikro dan mikro yang menggerakkan ekonomi riil-kerakyatan di pedesaan dan suburban area. Ketangguhan BMT telah dibuktikan dengan keberhasilannya menjadi lembaga keuangan mikro yang andal. Kemampuannya untuk menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat dengan skala yang besar adalah suatu prestasi yang luar biasa. Mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha berskala mikro, yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai target nasabah yang menjanjikan.

Definisi level mikro antara perbankan dengan BMT/koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) memiliki perbedaan yang mendasar. Level mikro bagi perbankan formal termasuk BPR dan BPRS, adalah pembiayaan dengan skala 50 s.d. 100 juta. Sedangkan BMT/KJKS, beroperasi pada skala mikro artinya dibawah 50 juta, bahkan memberikan pem-

Tabel 1
Perkembangan harta BMT Tahun 2014 (dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	% Kenaikan
1	Aset	229,17 M	305,00 M	33,00%
2	Pendapatan	37,60 M	24,00M	56,67%
3	Beban usaha	19,80 M	33,80 M	70,71%
4	EAT	2,09 M	2,55 M	22,01%

Sumber: Inkopsyah 2014 diolah.

JBB

7 1

133

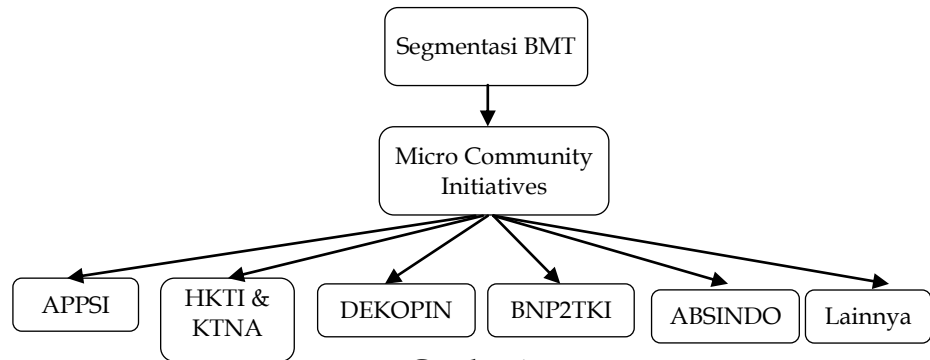
biayaan sekitar 100 ribu. Level mikro dengan definisi BMT ini tidak digarap oleh perbankan secara umum karena dianggap tidak bankable, tidak menguntungkan dan kurang efisien. Dalam dunia perbankan, baik konvensional dan syariah mengalami perlambatan pertumbuhan bisnis, khususnya dalam hal penyaluran pembiayaan dan seharusnya BMT mengambil peluang dari hal tersebut. Bank kurang berminat di dalam memberikan pinjaman kepada nasabah yang penghasilannya hanya 10 dolar per hari. Sehingga pada umumnya bank-bank cenderung menahan diri dan berhati-hati menyalurkan pembiayaan.

BMT harus cermat menempatkan posisinya dalam memanfaatkan peluang tersebut. Pasalnya seagresifnya bank menyalurkan pembiayaan ke mikro, namun tetap ada batasan yang membuat bank tidak dapat menyalurkan pembiayaan mikro seperti BMT. Upaya jemput bola nasabah yang dilakukan bank tidak bisa sedekat seperti yang dilakukan oleh BMT. Kondisi tersebut memaksa bank bekerjasama dengan BMT dalam menyalurkan pembiayaan mikro. Bentuk kerja sama yang dibangun antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank telah mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, misalnya saja bantuan sosial berupa CSR (Corporate Social Responsibility). Sebagai contoh, Bank Central Asia Syariah (BCAS) Surabaya telah mengadakan kerjasama dengan BMT Usaha Gabungan Terbadu (UGT) Sidogiri sejak tahun 2013, di mana sudah memberikan dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang sampai tahun 2015 ini telah mencapai angka Rp 50 miliar.

Potensi BMT Dalam Mewujudkan *Interbank network*

Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga keuangan mikro terbesar di dunia, sebagian berbentuk baitul maal wa tamwil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah, serta merupakan negara penerbit sukuk negara terbesar, dan satu-satunya negara yang menerbitkan sukuk ritel. Data Bank Indonesia menunjukkan, Indonesia menjadi lembaga keuangan mikro syariah terbesar di dunia karena memiliki lembaga keuangan mikro syariah paling bervariasi. Jumlah paling banyak khususnya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang memiliki program akad syariah satu-satunya di dunia. Pertumbuhan harta kekayaan BMT hingga akhir tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wat Tamwil (Inkopsyah BMT), perkembangan harta BMT hingga akhir 2014 seperti pada Tabel 1.

Inkopsyah juga merinci perolehan pendapatan itu diterima dari pendapatan bagi hasil pembiayaan sebesar Rp33,9 miliar, pendapatan administrasi Rp2,56 miliar, pendapatan jasa manajemen Rp1,06 miliar, dan pendapatan margin lainnya senilai Rp24 juta. Hal ini mengindikasi-



Gambar 1
Prospek Segmentasi BMT

Tabel 2
Potensi Segmentasi Anggota BMT

No	Segmentasi	Nama Asosiasi	Jumlah Anggota
1	Pedagang Pasar Tradisional	Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia (APPSI)	12,6 juta orang
2	Petani & Pelayan	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	14,6 juta orang
3	Koperasi	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	141,326 unit dengan 27,7 juta orang
4	TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	8 juta orang (legal dan illegal)
5	BMT	Asosiasi BMT Se-Indonesia (ABSINDO)	5 juta orang
Total			67,9 juta orang

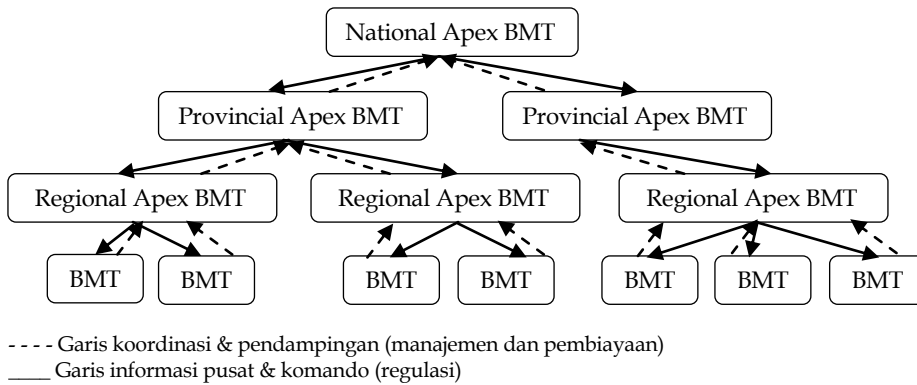
Sumber: ABSINDO 2014 diolah.

kan bahwa pengembangan BMT di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 3 tahun terakhir. Sehingga BMT berpotensi untuk melakukan penguatan jaringan berbasis *interbank network* mengingat jumlah aset yang meningkat dapat diasumsikan bahwa terdapat tumbuh-kembangnya BMT-BMT di seluruh Indonesia dan berpeluang untuk memiliki satu konektivitas antar BMT di seluruh Indonesia dalam penguatan jaringan antar BMT.

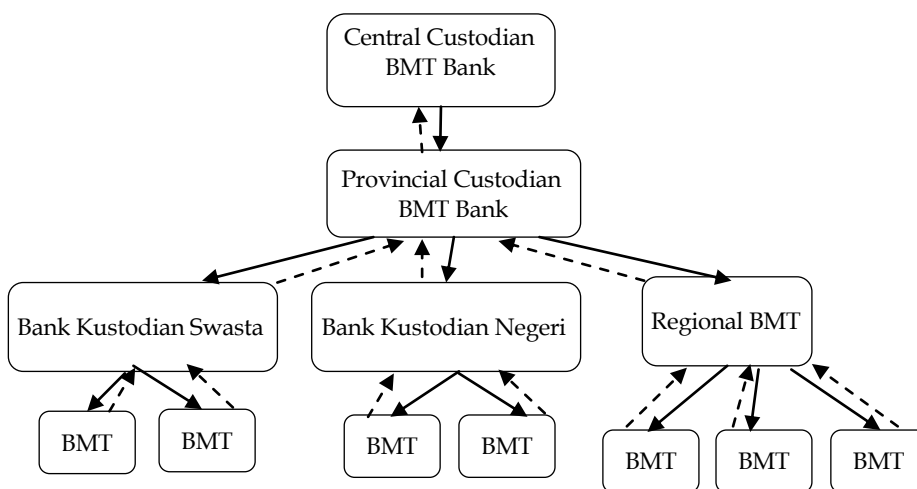
Perluasan dan penguatan jaringan kerja antar LKM-S BMT merupakan salah satu program pengembangan kegiatan Asosiasi BMT Se-Indonesia (ABSINDO) dimana dalam hal ini masyarakat, UMKM, pedagang dan petani merupakan pangsa pasar BMT sebagai *micro community initiatives*. Berdasarkan data ABSINDO tahun 2014 pangsa pasar BMT tersebut juga memiliki asosiasi atau lembaga yang tergabung di dalamnya yang juga merupakan prospek segmentasi anggota BMT seperti Gambar 1.

ABSINDO melansir sejumlah anggota asosiasi atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan prospek segmentasi atau pangsa pasar BMT sebagai potensi pengembangan BMT berbasis *intebank network* seperti yang tertera pada Tabel 2.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat diindikasikan bahwa prospek



Gambar 2
Apex Model Pengembangan BMT



Gambar 3
Model Bank Kustodian BMT

atau peluang segmentasi BMT dapat berkembang hingga 67,9 juta orang yang tergabung dalam beberapa asosiasi atau lembaga yang mayoritas merupakan masyarakat ekonomi mikro dengan asumsi bahwa terdapat kemungkinan anggota dari salah satu asosiasi tersebut merupakan anggota dari asosiasi lain, misalnya anggota APPSI mungkin juga merupakan anggota dari HKTI dan juga anggota BMT atau Koperasi. Sehingga terdapat peluang terhadap BMT untuk membuat suatu pengembangan jaringan yang berbasis *interbank network* untuk menjembatani anggotanya yang tergabung dalam beberapa asosiasi tersebut, sebab anggota-anggota dari asosiasi tersebut bisa saja merupakan anggota BMT maupun LKM-S lain di Indonesia.

Langkah-Langkah Optimalisasi Pemberdayaan BMT

Sesuai dengan perkembangan BMT dan potensi BMT dalam membangun *Interbank Fund Transfer* yang telah dipaparkan di atas, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan BMT adalah sebagai berikut:

Pertama, membentuk apex BMT dengan mengembangkan 1 (satu) BMT sebagai pusat BMT sebagai pengayom BMT-BMT lainnya di Indonesia. BMT yang telah dikembangkan tersebut, berperan untuk men-

gayomi beberapa BMT yang difungsikan sebagai induk BMT dari seluruh cabang BMT, seperti yang diperagakan pada Gambar 2.

Kedua, membentuk Bank Kustodian BMT dan melakukan kerja sama dengan pihak lembaga perbankan negeri maupun swasta. Prinsip kerja sama yang dijalankan adalah gotong royong (*partnership*) dan prinsip bagi hasil yang adil sesuai kompetensi dan investasi masing-masing. Kerja sama yang telah dibentuk sebagai induk BMT secara regional maupun dengan asosiasi BMT se-Indonesia (ABSINDO), serta Bank Negeri atau Swasta yang telah ditunjuk oleh kesepakatan bersama dan berperan sebagai regulator yang menetapkan peraturan dan kebijakan arah pengembangan apex BMT selanjutnya seperti pada Gambar 3.

Ketiga, mengembangkan produk dan fitur BMT dengan melakukan infrastruktur jaringan berbasis e-payment dan membentuk kartu ATM BMT seperti BMT Cash maupun berupa mobile phone seperti BMT On Phone. BMT mendirikan kios berisi ATM, mini ATM dan beberapa EDC (*Electronic Delivery Channel*) di BMT-BMT yang terdaftar sehingga BMT Cash dapat digunakan oleh nasabah BMT sebagai sarana dari alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Terinterkoneksinya sistem *delivery channel* ini diharapkan untuk memudahkan transaksi e-banking di setiap BMT seperti halnya transfer antar cabang dalam 1 (satu) BMT, transfer antar nasabah dalam 1 (satu) BMT, pembayaran tagihan (*bill payment*), dan pencairan dana yang bersifat non-cash.

Keempat, BMT melakukan kerja sama dengan lembaga atau organisasi pengelola jasa *interbank network* seperti PT. Artajasa. Dalam hal transaksi berbasis *Interbank Fund Transfer* ini diharapkan nasabah BMT nantinya dapat melakukan transaksi melalui ATM Bersama dengan menggandeng BMT-BMT lainnya, LKM-S lainnya, hingga Bank-Bank Swasta maupun Negeri yang telah terdaftar sebagai partner BMT-BMT seluruh Indonesia dalam apex model pengembangan BMT dan melakukan adanya penghimpunan dana atas simpanan bersama di BMT Pusat Nasional sehingga transaksi penarikan dana nasabah BMT dapat dilakukan di counter ATM Bersama mana saja.

Kelima, pemerintah bersama ABSINDO melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa BMT dapat digunakan sebagai alternatif lembaga keuangan kemasyarakatan yang Islami dan memberikan layanan masyarakat dalam hal penghimpunan dana maupun pembiayaan mikro yang dapat disalurkan ke masyarakat mikro.

5. SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Perkembangan BMT di Indonesia sampai saat ini telah mencapai 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia dengan ±3,5 juta orang nasabah jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha riil-mikro yang menggerakkan ekonomi riil-kerakyatan di pedesaan dan sub-urban area dengan akses yang lebih meluas daripada lembaga perbankan.

Prospek atau peluang segmentasi BMT dapat berkembang hingga 67,9 juta orang dan merupakan mayoritas masyarakat ekonomi mikro yang tergabung dalam beberapa asosiasi kemasyarakatan dengan

asumsi bahwa terdapat kemungkinan anggota dari salah satu asosiasi tersebut merupakan anggota dari asosiasi lain, sehingga terdapat peluang terhadap BMT untuk membuat suatu pengembangan jaringan yang berbasis *interbank network* untuk menjembatani anggotanya yang tergabung dalam beberapa asosiasi tersebut, sebab anggota-anggota dari asosiasi tersebut bisa saja merupakan anggota BMT maupun LKM-S lain di Indonesia

Mengingat potensi BMT dalam ikut serta membantu memperkuat perekonomian nasional, maka langkah-langkah untuk mengoptimalkan pemberdayaan BMT adalah sebagai berikut:

1. **Pertama**, membentuk apex BMT dengan mengembangkan 1 (satu) BMT sebagai pusat BMT sebagai payom BMT-BMT lainnya di Indonesia yang difungsikan sebagai induk BMT dari seluruh cabang BMT.
2. **Kedua**, membentuk Bank Kustodian BMT dan melakukan kerja sama dengan pihak lembaga perbankan negeri maupun swasta yang telah ditunjuk oleh kesepakatan bersama dan berperan sebagai regulator yang menetapkan peraturan dan kebijakan arah pengembangan apex BMT selanjutnya dengan prinsip kerja sama yang dijalankan adalah gotong royong (*partnership*) dan prinsip bagi hasil yang adil sesuai kompetensi dan investasi masing-masing.
3. **Ketiga**, mengembangkan produk dan fitur BMT dengan melakukan infrastruktur jaringan berbasis *e-payment* dan membentuk kartu ATM BMT seperti BMT Cash maupun berupa *mobile phone* seperti BMT On Phone serta mendirikan kios berisi ATM, mini ATM dan beberapa EDC (Electronic Delivery Channel) di BMT-BMT yang terdaftar sehingga BMT Cash dapat digunakan oleh nasabah BMT sebagai sarana dari alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
4. **Keempat**, BMT melakukan kerja sama dengan lembaga atau organisasi pengelola jasa *interbank network* seperti PT. Artajasa Pembayaran Elektronik berbasis *Interbank Fund Transfer* di mana untuk ke depannya diharapkan nasabah BMT nantinya dapat melakukan transaksi melalui ATM Bersama dengan menggandeng BMT-BMT lainnya, LKM-S lainnya, hingga Bank-Bank Swasta maupun Negeri yang telah terdaftar sebagai *partner* BMT-BMT seluruh Indonesia.
5. **Kelima**, pemerintah bersama ABSINDO melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa BMT dapat digunakan sebagai alternatif lembaga keuangan kemasyarakatan yang Islami dalam hal pembiayaan mikro yang lebih meluas.

Pihak pengelola BMT hendaknya selalu optimis dalam mengembangkan jaringan maupun nasabahnya dalam hal pembiayaan sebab level mikro perbankan memiliki anggapan bahwa level mikro pada BMT yaitu dibawah 50 juta, bahkan memberikan pembiayaan sekitar 100 ribu bersifat tidak *bankable*, tidak menguntungkan dan kurang efisien sehingga dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi BMT untuk terus meningkatkan anggotanya.

Pihak pemerintah hendaknya bekerja sama dengan ABSINDO maupun DEKOPIN untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif tentang manfaat dan fungsi BMT dalam hal pembiayaan secara Islami pada sektor ekonomi mikro.

Pihak masyarakat hendaknya melakukan pemenuhan pembiayaan ke BMT sebab BMT memiliki level mikro yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan hingga tingkat biaya yang lebih rendah daripada perbankan.

Pihak akademisi hendaknya lebih melakukan penelitian secara berkelanjutan tentang pemberdayaan BMT, fungsi dan manfaat BMT untuk kesejahteraan umat di era liberalisasi ekonomi ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggun Dini, 'Perkembangan BMT', <<http://anggundineey17.blogspot.com/2012/05/baitul-maal-wat-tamwiil-bmt.html>>, diakses pada tanggal 10 November 2016.
- Aries Muftie, 2014, 'Pemberdayaan Micro Finance Syariah dalam Pengembangan UMKM', Jakarta: Seminar Bulanan MES: BRI I: Auditorium Lt 21.
- BMT Amanah Bersama, 'BMT Sebagai Pendorong Ekonomi Kerakyatan', <<http://bmtamber.co.id/bmt-sebagai-pendorong-ekonomi-kerakyatan-2/>>, diakses pada tanggal 10 November 2016.
- BMT Amanah Bersama, 'BMT Berpeluang Tumbuh Saat Ekonomi Terpuruk' <<http://bmtamber.co.id/bmt-berpeluang-tumbuh-saat-ekonomi-terpuruk/>>, diakses pada tanggal 10 November 2016.
- Lutfiyah Rijma Hanna, 2012, 'Peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Perambabulan Al-Qomariyah dalam Memberdayakan Perdagangan Usaha Kecil (Di Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon)', Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, Hal. 1.
- Syafii Antonio, Muhammad, 2010, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Hal. 4.
- Sandingan Data Induk Koperasi Syariah Tahun 2014.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- <http://smeindonesia.org/bmt-bantu-ukm-untuk-perkembangan-perekonomian/529/>, diakses pada tanggal 11 November 2016.
- <http://www.puskopsyahlampung.com/2013/05/perkembangan-bmt-dari-tahun-ke-tahun.html>, diakses pada tanggal 11 November 2016.
- <http://surabaya.tribunnews.com/2015/04/27/bca-syariah-gandeng-bmt>, diakses pada tanggal 11 November 2016.
- <https://docs.google.com/document/d/1bFXYKHLUxhu5KFsnCEIp2fNWxok1xfl7S2mjavIOmc/edit>, diakses pada tanggal 10 November 2016.
- <http://jagb.journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/viewFile/757/4112>, diakses pada tanggal 12 November 2016.
- <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Jurnal/ijvy1384098916.pdf>, diakses pada tanggal 13 November 2016.

Koresponden Penulis

Nur Ghaziyatul Iffah dapat dikontak pada e-mail: muaz@perbanas.ac.id